



Konflik Jangan Sampai Korbankan Murid

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta meminta proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bhinneka Tunggal Ika segera dilakukan di ruang sekolah. Selain representatif, ruang sekolah juga tidak membuat siswa menjadi kesulitan dalam belajar.

"Kami berharap agar siswa bisa kembali belajar di ruangan yang representatif atau tempat semula. Karena, jika terlalu lama di luar

sekolah siswa bisa kesulitan dalam belajar," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Santoso Asrori, Selasa (18/7).

Budi mengaku sudah melakukan tinjauan pada proses KBM siswa di Ndalem Notoprajan, Kecamatan Kraton, kemarin. Dalam tinjauan ini, pihaknya juga meminta agar pihak kepala sekolah dan guru bisa segera menyelesaikan persoalan mereka dengan pihak yayasan.

"Persoalan internal ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Dipetakan dulu penyelesaian bagaimana dan kami juga berharap tidak terlalu lama. Kami juga sudah koordinasi," jelasnya.

Cara untuk menyelesaikan persoalan internal ini di antaranya adalah membuka ruang dialog anta-



TRIBUN JOGJA/BRAMASTO ADHY

AKTIVITAS SEKOLAH - Murid SD dan SMP Bhinneka Tunggal Ika bersama sejumlah guru melakukan aktivitas pertama masuk sekolah setelah liburan di Ndalem Notoprajan, Yogyakarta, Senin (17/7).

ra yayasan dan juga guru ataupun kepala sekolah. Dialog ini dimungkinkan bisa meredam konflik yang terjadi di sekolah berbasis

nasional plus ini. "Dialognya orang per orang dulu," ulasnya.

● ke halaman 14

Konflik Jangan Sampai

• Sambungan Hal 13

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, sudah meminta dinas pendidikan setempat untuk mendalami persoalan ini. Di antaranya, adalah memetakan penyelesaian yang bisa ditawarkan karena konflik internal ini.

"Kami belum mendapatkan laporan dari dinas pendidikan terkait ini. Mereka sudah terjun dan kami minta untuk mendalami persoalan ini," kata Haryadi.

Dia mengatakan, KBM memang seyogyanya dilaksanakan di ruang kelas. Hal ini pun menjadi jaminan bagi siswa agar mendapatkan hak pendidikan mereka yang layak. Akan tetapi, dia berharap, persoalan internal ini bisa diselesaikan.

"Pembkot melalui dinas pendidikan juga berupaya untuk memberikan pemahaman apa yang bisa dilakukan (untuk menyelesaikan masalah ini)," katanya.

Legal

Kepala Sekolah SMP Bhinneka Tunggal Ika (BTI) Yogyakarta, Theresia Nariza menjelaskan, KBM ini akan dilaksanakan oleh pihaknya di Ndalem Notoprajan hingga Jumat (20/7) mendatang. Selain itu, dia mengatakan jika proses belajar dan mengajar di Ndalem Notoprajan adalah proses pendidikan di luar kelas atau *summer school*.

"Kegiatan belajar mengajar kami ini legal kok. Bahkan tadi (kemarin) dinas pendidikan yang menilai begitu. Kami juga diminta untuk segera menyelesaikan konflik dengan yaya-

san," jelasnya.

Meski dilaksanakan di luar kelas, dia menilai KBM ini efektif bagi siswa. Menurutnya, siswa bisa menggunakan beragam media di lingkungan Ndalem Notoprajan untuk belajar.

"Siswa bisa menggunakan daun dan pohon untuk pelajaran IPA. Atau matematika, mereka bisa menghitung jumlah mobil yang ada, dan lainnya yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran," jelasnya.

Hingga saat ini, pihaknya tetap menuntut hak pengajar yang memang seharusnya diberikan oleh yayasan. Di antaranya, dia juga memprotes adanya guru yang sudah mengabdikan selama 20 tahun, namun diperlakukan sebagai karyawan kontrak.

"Seharusnya sebagai pegawai tetap, apa harus memperpanjang kontrak. Sementara, kontraknya saja tidak diberikan," ujarnya.

Dia juga kembali menyebutkan, jika proses KBM tidak didanai oleh yayasan sejak awal tahun lalu. Selain itu, yayasan juga dianggap tidak sepenuhnya memercayai bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah.

"BOS, KMS, dan JPD ini kami tujukan untuk anak-anak, ini bantuan operasional sekolah bukan bantuan operasional yayasan," katanya.

Sebelumnya, Mustofa, Pembina Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta mengatakan tentang kabar ada dua oknum yayasan mengklaim menguasai gedung sekolah dan memecat para guru adalah tidak benar.

"Saya tidak pernah men-

dengar secara langsung ada dua orang yayasan yang mau mengambil alih. Bagi saya konyol, yayasan itu kan infus hukum, ada aturan hukum, mau mengambil alih itu bagaimana caranya, dan tidak bisa," ujar Mustofa, Senin (17/7).

Mustofa mendengar ada oknum atau guru-guru yang menghubungi wali murid secara ilegal, memberitahukan bahwa sekolah Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta pindah ke Ndalem Notoprajan, Jalan KH Agus salim Notoprajan.

Menurutnya itu adalah tindakan yang ilegal karena tidak atas persetujuan yayasan, dan diurus oleh pengurus yang tidak punya legalitas. Pengurus harian yang sudah diberhentikan.

"Pernyataan itu mengagetkan, soal pemindahan ngajar mengajar itu tidak ada. Yayasan tidak pernah berunding, tidak pernah berunding, yayasan juga tidak pernah memutuskan untuk memindahkan. Sekolahnya saja masih ada, pemindahan itu ilegal," tandas Mustofa.

Ia menceritakan bagaimana hal tersebut bermula dikarenakan ada seorang pengurus harian atau manajer sekolah Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta yang tidak terima karena telah digantikan dengan yang baru.

"Karena manajer ini kerjanya tidak optimal dan maksimal, murid tidak bertambah, pengeluaran sekolah ini nombok puluhan juta setiap bulannya. Sehingga dari pengurus yayasan ada pikiran untuk mengganti manajer baru supaya bisa makin berkembang," lanjutnya.

yang menyebarkan cerita bohong tentang sekolah yang akan diambil alih oleh dua oknum yayasan adalah seorang perempuan yang dulunya pengurus harian atau manajer di Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta.

"Saya bahkan prihatin, karena memindahkan siswa itu tidak درست dan bukan merupakan kegiatan yayasan, saya kasihan kepada wali murid dan muridnya nanti. Mereka (wali murid) ini dalam tanda kutip mengikuti arus yang salah, karena tidak memiliki izin," kata Mustofa.

Mediasi

Setelah melakukan pendalaman informasi dari pelapor terkait tindak lanjut penanganan laporan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika (BTI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan mediasi yang melibatkan Yayasan BTI, Pengelola Sekolah, dan Dinas Pendidikan, Selasa (18/7).

"Untuk itu Tim Ombudsman sedang menjajaki *bridging komunikasi* dengan Pengurus Yayasan dalam waktu dekat. Mengingat kondisi terkini layanan pendidikan bagi para siswa sekolah Bhinneka Tunggal Ika," kata Kepala ORI DIY, Budi Masturi.

Budi mengatakan permasalahan lebih pada sengketa antara yayasan dan pengelola sekolah, namun ada dimensi pelayanan pendidikan terhadap para siswa-siswi yang terdampak. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan juga perlu memberikan perhatian untuk menyelesaikan aspek pelayanan pendidikan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005